

BAB V

KESIMPULAN

Perubahan strategi kebijakan dan diplomasi keamanan nasional dan luar negeri Tiongkok terhadap ASEAN pasca Perang Dingin, tidak dapat terlepas dari adanya perubahan budaya strategis Tiongkok. Perubahan budaya strategis tersebut, tercermin dari adanya restorasi budaya strategis keamanan Tiongkok, dari *Cultural Realism* pada era Perang Dingin menuju *Confucian Pacifism* pasca Perang Dingin. Perubahan budaya strategis tersebut, berimplikasi pada perubahan norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanan Tiongkok terhadap ASEAN. Budaya strategis *Cultural Realism* yang dicirikan dengan *militarism, use of force, offensive grand strategy, power politics, hegemonism, violent-means* dan *expansionist*, menjadikan Tiongkok tampil sebagai kekuatan agresor (*hegemon*) dalam mencapai tujuan-tujuan keamanannya di Asia Tenggara.

Namun pasca berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan kembalinya *Confucian Pacifism* sebagai budaya strategisnya, agresivitas dan ofensivitas Tiongkok dalam mencapai tujuan-tujuan keamanannya mulai secara gradual mengalami perubahan strategis. Budaya keamanan *Cultural Realism* mulai tergantikan oleh norma-norma dan prinsip-prinsip budaya strategis *Confucian Pacifism*. Sebagai konsekuensinya, strategi diplomasi keamanan Tiongkok terhadap ASEAN juga mengalami perubahan strategis. Tiongkok mulai

means dan *non-expansionist* dalam mencapai kepentingan keamanannya terhadap ASEAN.

Salah satu pengaruh perubahan budaya strategis Tiongkok terhadap ASEAN dalam konteks diplomasi keamanannya adalah keterikatan Tiongkok dalam arsitektur keamanan kawasan yaitu: *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (Traktat TACSA ASEAN). Keterlibatan Tiongkok dalam TACSA tersebut merupakan perwujudan nyata dari norma-norma dan prinsip-prinsip budaya strategis keamanannya *Confucian Pacifism*.

Keputusan Tiongkok untuk terikat dalam Traktat TACSA ASEAN tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut yaitu: *Pertama*, adanya faktor konformitas antara Traktat TACSA ASEAN dengan norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanan *Confucian Pacifism*, dimana karena konformitas tersebut, menciptakan *common security identity*, sebuah identitas budaya keamanan bersama yang *non-coercive identity* karena adanya *share similar values* sehingga akan terbentuk *shared understanding* antara Tiongkok dan ASEAN. Dengan adanya konformitas tersebut, tentunya akan mempermudah Tiongkok dalam mencapai tujuan-tujuan keamanannya di kawasan, karena adanya kesamaan norma-norma dan prinsip-prinsip keamanan serta kebijakan yang relevan dengan ASEAN.

Kedua, keterlibatan Tiongkok dalam Traktat TACSA ASEAN tersebut, tidak terlepas dari upayanya untuk meningkatkan pengaruh budayanya di Asia Tenggara, dengan meng-*counteract* sesat fikir tentang budaya keamanannya yang *Cultural Realism* pasca Perang Dingin, sebagaimana didengungkan oleh Barat dan

tanpa terkawal di ASEAN. Tiongkok menyadari bahwa lemahnya pengaruh

global nilai-nilai budaya Tiongkok telah menciptakan sesat fikir mengenai Tiongkok yang *an sich*. Oleh karenanya, Tiongkok ingin mengintrodusir norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanannya yang baru sebagai bentuk *enlightenment* terhadap *misunderstood* dan *misperception* agar citra dan reputasi Tiongkok tidak “buruk” di mata dunia internasional tanpa terkecuali di ASEAN.

Ketiga, keterlibatan Tiongkok dalam Traktat TACSA ASEAN tersebut, sebagai upaya Tiongkok untuk dapat berkontribusi secara positif dan konstruktif dalam mengupayakan agar tidak terjadi peperangan, dan mencegah berkembangnya eskalasi konflik di kawasan melalui model pendekatan keamanan *non-militarism*, *non-use of force*, *defensive grand strategy*, *no hegemonism*, *no power politics*, *non-violent means* dan *non-expansionist* dalam membangun struktur hubungan keamanan antara kedua belah pihak, baik Tiongkok maupun ASEAN.

Salah satu persoalan utama yang mengganggu harmonisitas hubungan keamanan antara Tiongkok dan ASEAN adalah konflik kedaulatan dan integritas teritorial Laut Tiongkok Selatan (LTS). Oleh karenanya, melalui keterikatannya dalam Traktat TACSA ASEAN tersebut, Tiongkok ingin meyakinkan dan memperkuat komitmen politik-keamanannya bahwa Tiongkok akan tetap terikat penuh pada perjanjian politik-keamanan *Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea (DoC)*, dimana Tiongkok akan tetap mengedepankan norma-norma dan prinsip-prinsip budaya keamanannya yang *Confucian Pacifism* dengan mengedepankan strategi *non-militarism*, *non-use of force*, *defensive grand strategy*, *non-violent means* dan *non-expansionist* dalam merespon berbagai upaya upaya

penyelesaian konflik LTS, sebagaimana sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip resolusi konflik yang diatur dalam DoC itu sendiri.

Keempat, keterlibatan Tiongkok dalam Traktat TACSA ASEAN tersebut menunjukkan komitmen politik-keamanannya bahwa Tiongkok tidak akan menjadi sebuah kekuatan hegemonik baru di kawasan. Sebagaimana dipersepsikan oleh negara-negara ASEAN sebelumnya, seiring dengan kebangkitannya dan peningkatan kekuatannya, baik secara ekonomi maupun militer. Namun justru sebaliknya, Tiongkok akan menjadi *a responsible major power*, sebuah kekuatan utama dunia yang bertanggungjawab, dan tetap menjadi kekuatan *status quo* dengan orientasi kebijakan luar negeri dan diplomasi keamanannya yang lebih bersahabat dan tidak mengancam terhadap ASEAN, seiring dengan kebangkitan damai Tiongkok.

Hal tersebut penting bagi Tiongkok, guna memitigasi dan menghilangkan persepsi ancaman Tiongkok yang agresif dan mengancam terhadap ASEAN, memprevensi ASEAN agar tidak terjebak pada situasi dilema keamanan, menghilangkan ketidakpercayaan politik ASEAN terhadap Tiongkok, menghapuskan dan “melepaskan diri” dari beban-beban politik masa lalu, menghilangkan kecurigaan ASEAN atas setiap “niat baik” Tiongkok di kawasan, dan untuk membangun zona saling percaya satu sama lainnya.